



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai II
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 171 /KPTS-24/ I /2026

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1087);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang pedoman teknis penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2000/KPTS-27/XII/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

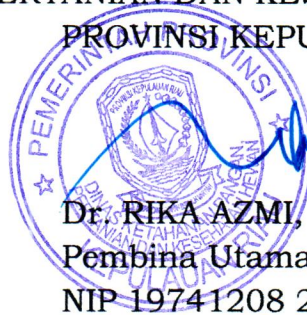
Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menyusun Perencanaan pengadaan.
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 3. Menetapkan rancangan kontrak.
 4. Menetapkan HPS.
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
 7. Menetapkan tim pendukung.
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli.
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 11. Mengendalikan kontrak.
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA.
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 15. Menilai kinerja penyedia.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19741208 200212 2 005

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 171 / KPTS - 24 / 1 / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1	2	3
1.	SEKRETARIAT 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Fasilitas Kunjungan Tamu 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17. Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 18. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 19. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 20. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 21. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 22. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 23. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi 24. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 25. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi 26. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 27. Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis 28. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Nama : Dr. Rika Azmi, S.TP. MM NIP : 197412082002122005 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.	1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 2. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Nama : Riza Satya Putri, S.H., M.H NIP : 197902212009042001 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan

3.	1. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 2. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan 3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Nama : Tri Ciptoningsih, S.Sos., M.Si NIP : 197506182005022005 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dan Hortikultura
4.	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9. Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11. Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang 12. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 13. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Nama : Nil Erison, S.TP NIP : 197503122005021005 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan Dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5.	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan/Material 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 10. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 11. Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Nama : Drh. Fitri Agustina NIP : 198108112008032002 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala UPTD Balai Pelayanan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19741208 200212 2 005